

dan pembangunan proses demokratis yang berkelanjutan. Tahun depan kami akan melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia, dan jika kita bandingkan panitia pemilihan pada tingkat daerah dan nasional, kita akan melihat bahwa panitia masih sangat lemah dan masih sangat mudah dikooptasi dan dipengaruhi oleh partai-partai politik dan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Karena itu saya juga sekarang waktunya untuk masyarakat asing untuk mendukung kegiatan yang akan menguatkan pembentukan proses demokratis. Dan terakhir tapi bukan yang paling kurang penting adalah peningkatan kerangka hukum karena ini diperlukan untuk melawan korupsi dan menguatkan supremasi hukum. Sekarang saya akan menambahkan bahwa SBY tidak akan gagal karena harapan masyarakat sangat tinggi. Karena ia telah dipilih, setiap hari ribuan rakyat datang ke rumahnya hanya untuk berjabat tangan dengannya dan meminta dia untuk mengurangi pengangguran, mengurangi biaya pendidikan, memerangi korupsi dsb. Jadi saya kira itulah fokus program CIDA dapat membantu mendukung hal-hal seperti itu.

Katili-Niode: Selama presentasi awal saya telah membuat beberapa saran. Saya tidak akan mengulanginya lagi di sini, tapi ada beberapa hal penting yang akan saya jelaskan, terutama kemungkinan untuk mendukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena ini adalah dewan yang baru dan masih sexy serta belum sepenuhnya dikembangkan, maka mereka benar-benar perlu didukung. Contoh, di Sulawesi saja ada sekitar 20 anggota DPD dan mereka harus membuat program-program dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu bagaimana berurusan dengan posisi mereka dan dengan konstituen mereka. Beberapa tahun ke belakang kita mengadakan sebuah diskusi dengan CIDA berkaitan dengan dukungan untuk DPR tapi pada saat itu para pejabat CIDA di Jakarta, mengatakan ada beberapa keterbatasan, sehingga kami harus bertanya kepada pemerintah Kanada apakah mungkin untuk mendukung DPR dan hal-hal seperti itu.

Tapi saya kira waktu memiliki makna di sini, sehingga CIDA harus membuat keputusan apakah mereka dapat terlibat dalam kegiatan tersebut atau tidak. Dan untuk melanjutkan apa yang Rustam katakan, menurut Departemen Dalam Negeri akan ada 176 posisi kepala pemerintahan daerah yang akan diperebutkan dalam pemilihan langsung setiap tahunnya (perkiraan untuk Juni 2005) - sehingga akan ada 6 posisi Gubernur, 26 wali kota, dan 144